

ABSTRAK

Akuntabilitas Politik Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kota Bandar Lampung

Oleh :

Putri Karisma Nabilatas P

Penelitian ini menganalisis implementasi program peningkatan kualitas perumahan tidak layak huni di Kota Bandar Lampung dengan fokus pada akuntabilitas politik sebagai mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas politik program peningkatan kualitas perumahan tidak layak huni di Kota Bandar Lampung terdapat hambatan struktural, yang kurang mendukung transparansi program. Hambatan struktural tersebut adalah keterbatasan akses informasi program, status kepemilikan tanah atas bangunan tidak layak huni, dan dinamika politik internal pemerintah dan legislatif, serta antarkeduanya. Keterbatasan transparansi program ini, berdampak pada responsivitas pemerintah, yang terbatas pada kontrol administratif untuk memastikan kelancaran program yang dirancang sendiri. Keterbatasan transparansi program menghambat integrasi partisipasi masyarakat, sehingga respons terhadap keluhan sering kali terasa sebagai formalitas belaka dan tidak membangun dialog yang sejajar. Mobilisasi dari atas mendominasi pengambilan keputusan, berupa instruksi aparat atau insentif langsung, tanpa inisiatif mandiri atau integrasi aspirasi dalam perencanaan awal, sehingga partisipasi berhenti saat insentif habis dan tidak membangun partisipasi masyarakat. Rantai kesenjangan dari transparansi, responsivitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat ini, memperkuat hierarki kekuasaan, melemahkan legitimasi pemerintah, dan menghasilkan solusi sementara tanpa transformasi jangka panjang.

Kata Kunci: Akuntabilitas Politik, Program Rumah Layak Huni, Transparansi, Responsivitas, Partisipasi, Kota Bandar Lampung.

ABSTRACT

Political Accountability of the Government Bandar Lampung City in Implementing the Decent Housing Program in Bandar Lampung City

By:

Putri Karisma Nabilatas P

This study analyzes the implementation of the program to improve the quality of uninhabitable housing in Bandar Lampung City, focusing on political accountability as a mechanism for government accountability to the public. Using a qualitative approach with a case study method, this study collected data from in-depth interviews, field observations, and document analysis related to the activities of the Housing and Settlement Agency and Commission 3 of the Bandar Lampung City Regional People's Representative Council (DPRD). The results of the study indicate that in the implementation of the political accountability program to improve the quality of uninhabitable housing in Bandar Lampung City, there are structural obstacles that do not support program transparency. These structural obstacles are limited access to program information, land ownership status for uninhabitable buildings, and the internal political dynamics of the government and the legislature, as well as between the two. This limited program transparency impacts government responsiveness, which is limited to administrative controls to ensure the smooth implementation of the program, which is designed independently. Limited program transparency hinders the integration of community participation, so that responses to complaints often feel like mere formalities and do not foster equal dialogue. Mobilization from above dominates decision-making, in the form of official instructions or direct incentives, without independent initiative or integration of aspirations into initial planning. Participation ceases when incentives run out and fails to foster community participation. This chain of failures in transparency, government responsiveness, and community participation reinforces power hierarchies, undermines government legitimacy, and produces temporary solutions without long-term transformation.

Keywords: *Political Accountability, Decent Housing Program, Transparency, Responsiveness, Participation, Bandar Lampung City.*